

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdi, Supriyanto. dkk. (2009). *Potret Pemenuhan Hak atas Pendidikan dan perumahan di era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Abdul Kadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali. (2009). *Menguak Teori Hukum (legal teori) dan Teori Keadilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence), Cet-1, Vol-1*. Jakarta: Kencana.
- Aprilia, Ika, Yusman Syaukat, and A. Faroby Falatehan. (2009). “*Optimisasi Manajemen Aset Tetap Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance Di Pemerintah Provinsi Dki Jakarta.*” *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah 10.2* (2018). Bogdan Dan Taylor, Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bahder Johan Nasution. (2017). *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Bogdan, Taylor, Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chalik Narbuko dan Abu Ahmad. (2007). *Metode Penelitian*. Jogjakarta: Bumi aksara.
- Dadang Suhardan dkk.(2012). *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Ferdiansyah, Analisis Pengelolaan Aset Pemerintahan Kabupaten Sambas Dalam Hubungannya Dengan Pemekaran Wilayah Kota Singkawang.
- Garaika dan Darmanah. 2019). *Metodologi Penelitian*. Lampung Selatan : Cv. Hira Tech.
- Hilman Hadikusuma. (1995). *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. (2013) *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- H.S. Sunardi dan Purwanto. (2006). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Solo. Global.
- Ibrahim Bafadal. (2003). *Manajemen Perlengkapan Sekolah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Juanda, Nawawi (2012). *Desentralisasi dan Kinerja Pelayanan Publik*. Makassar: Menara Intan.
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Yamin Lubis. (2008). *Hukum Pendaftaran Tanah*. Mandar Maju: Bandung.
- Muhammad Hafidz Ramadhani. (2014). *Permasalahan Hukum Dari Pemekaran Daerah Terhadap Aset-Aset Milik Daerah Induk dan Daerah Hasil Pemekaran*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Sidharta Gautama. (2006). *Kepastian Hukum di Indonesia*. Bandung: Penerbit Cahaya.
- Soerjono Soekanto. (1983). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Rajawali Press.
- Sri Minarti. (2011). *Manajemen Sekolah (mengelola lembaga pendidikan secara mandiri)*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media.
- Suharizal. Muslim Chaniago. (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta : Thafa Media.
- Suharsimi Arikunto. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Suteki dan Galang Taufani. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Theo Huijber. (1995). *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah Cet. Ke VIII*. Yogyakarta: Kanisius.
- Zainuddin Ali. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Republik Indonesia Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Dan Kabupaten Aceh Tamiang.

Undang-Undang Keuangan Daerah. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah.

Undang-Undang Pembendaharaan Daerah. Undang-Undangan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Daerah.

Undang-Undang Otonomi Daerah. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

Peraturan Walikota Langsa Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintahan Kota Langsa.

Qanun Aceh Pengelolaan Barang Milik Aceh. Qanun Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh.

Qanun Aceh Pengelolaan Barang Milik Aceh. Qanun Nomor 14 Tahun 20

C. Jurnal, Tesis dan Karya Ilmiah

Afdaluddin. (2021). Analisis Pengelolaan dan Pelaporan Aset Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Tesis fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Arief Darmawan, (2014). Hanny Tristi Perdani. *Penyuluhan Tentang Prosedur Pengurusan Peralihan Hak Atas Tanah Karena Perbuatan Hukum*. Jurnal pengabdian Masyarakat. (file:///C:/Users/ASUS/Downloads/admin,+4.+Artikel+2014+Isma+Nur+uh+ayati+(2)+Hal+13-16-jik.pdf).

Kahfi, Syuratul. (2016). *Peralihan Pengelolaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dalam Penyelenggaraan Pendidikan SMA/SMK di Provinsi Lampung*. FIAT JUSTISIA. Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung. Volume 10 Number 4, October-December.

Mutmainah, Nofia, Dkk. *Pengelolaan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bima)*. Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang.

D. Sumber Lain

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-biak/baca-artikel/14179/Perspektif-Pengelolaan-Barang-Milik-Daerah-BMD-Sebagai-Modal-Awal-Pembangunan-Nasional.html> diakses Tanggal 1 Desember 2022.

<https://kbbi.web.id/inventarisasi> diakses pada tanggal 20 Januari 2022 tentang Pengertian Inventarisasi.

<https://kbbi.web.id/aset> diakses pada tanggal 20 Januari 2022 tentang Pengertian Aset.

<https://pdb-lawfirm.id/jenis-jenis-peralihan-hak-atas-tanah/> diakses pada tanggal 13 Maret 2023 tentang Jenis peralihan Hak Atas Tanah.